

AKHIRNYA YARSI SIMPANG EMPAT DISEGEL MASYARAKAT

Penyegegalan Rumah Sakit Ibnu Sina Yarsi Simpang Empat yang dilakukan LSM Wadah Muda Peduli Lingkungan (WAMPEL) tanggal 14 Maret 2007 sebagai akumulasi kekecewaan atas tidak kunjung selesainya kasus PHK sepihak yang dilakukan Ketua Yarsi Sumatera Barat terhadap dua orang karyawan Yarsi Simpang Empat.



Penyegelan kantor RS Yarsi Simpang Empat

Ketua LSM Wampel Helju Sepli Tuhari, SP mengatakan bahwa penyegelan yang dilakukan terhadap kantor direktur Yarsi Simpang Empat terpaksa dilakukan sebab penyelesaian kasus PHK sepihak yang telah bergulir ke DPRD Pasaman Barat sejak bulan Mei 2006 tidak kunjung selesai, sudah tiga kali sidang yang dilakukan komisi C DPRD Pasaman Barat untuk menyelesaikan kasus PHK tersebut namun tidak didapatkan keputusan karena Ketua Yarsi Sumbar tidak pernah menghadiri sidang. Sementara itu komisi C telah memutuskan bahwa Yarsi Simpang Empat telah melanggar UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan memerintahkan kepada Yarsi Simpang Empat untuk mengembalikan hak pekerja paling lama 1 Juli 2006.

Selanjutnya Helju mengatakan bahwa Ketua Yarsi Sumbar tidak memiliki itikat baik dalam menyelesaikan kasus PHK tersebut, dan lebih menyetengahkan aroganisme dan selalu menganggap bahwa keputusan yang mereka buat sudah sesuai dengan peraturan yang ada di Yarsi, padahal peraturan yang mereka buat akan batal apabila bertentangan dengan peraturan atau undang-undang yang lebih tinggi.

Sementara itu tuntutan pekerja tidaklah banyak hanya berupa apabila PHK yang dilakuakn tidak sesuai dengan UU nomor 13 tahun 2003, maka mereka dipekerjakan kembali tanpa syarat atau mereka menerima PHK dan dibayarkan hak-hak mereka sesuai dengan UU ketenagakerjaan.

Harapan dari ketua LSM Wampel adalah janganlah ditunggu masyarakat melakukan aksi dulu untuk menyelesaikan kasus atau tuntutan mereka dan agar Ketua Yarsi Sumbar segera menyelesaikan kasus PHK terhadap Nora Novia dan Rina Susanti dan LSM Wampel akan tetap berjuang hingga putusan hukum tertinggi di Negara ini untuk mendapatkan hak pekerja.